



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2019/Periodik - 2018)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH KONSTITUSI  
**UNIT KERJA** : HAKIM KONSTITUSI  
**SUB UNIT KERJA** : HAKIM KONSTITUSI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **Saldi Isra**
2. Jabatan : **HAKIM KONSTITUSI**
3. NHK : **423339**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.790.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 403 m2/350 m2 di KOTA PADANG ,  
HASIL SENDIRI Rp. 640.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 787 m2/600 m2 di KOTA PADANG ,  
HASIL SENDIRI Rp. 1.450.000.000
3. Tanah Seluas 2452 m2 di KOTA SOLOK , HASIL SENDIRI Rp.  
700.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 250.000.000

1. MOBIL, Toyota Yaris Minibus Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.  
240.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 1FDC CAST WHEEL Tahun 2015, LAINNYA  
Rp. 10.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 190.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. 3.000.000.000**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 2.443.042.070**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 8.673.042.070**III. HUTANG** Rp. ---**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 8.673.042.070**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **18 Juni 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.